

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pembiayaan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah. Masing-masing Pemerintah Daerah mempunyai fungsi dan tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan melaksanakan pembangunan disegala bidang. Seperti yang tercantum dalam Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah bahwa “Pemerintah Daerah berhak dan berwenang menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan” (Pasal 10). Dengan adanya hak dan wewenang yang diberikan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, hal tersebut merupakan suatu upaya untuk meningkatkan peran Pemerintah Daerah dalam mengembangkan potensi daerahnya dengan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah. PAD merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Dari beberapa sumber pajak daerah yang ada, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor merupakan penyumbang PAD yang penerimaannya

mengalami penurunan dari periode 2014 - 2018. Berikut merupakan data target dan realisasi PBB-KB pada UPT pengelolaan pendapatan daerah Surabaya Utara periode 2014 -2018:

Tabel 1.1  
Data Target dan Realisasi PBBKB

Tahun	Target	Realisasi	%
2014	52.825.883.000	62.532.006.340	118,37
2015	63.432.270.000	62.172.343.669	98,01
2016	43.647.587.000	56.773.680.803	130,07
2017	55.799.450.000	57.586.747.108	103,20
2018	54.000.000.000	56.665.249.444	104,94

Sumber: UPT PPD Surabaya Utara

Dapat dilihat dari table diatas bahwa target dan realisasi pendapatan pajak bahan bakar kendaraan bermotor pada UPT PPD Surabaya Utara mengalami fluktuasi, pada tahun 2015 menunjukkan bahwa realisasi pajak bahan bakar kendaraan bermotor hanya mampu memperoleh 98,01% dari target yang telah ditetapkan, sedangkan untuk tahun 2016 target serta realisasi pajak bahan bakar kendaraan bermotor menurun. Penurunan Realisasi Pajak Bakar Kendaraan Bermotor ini juga akan mempengaruhi tingkat penerimaan Kas pada UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Surabaya Utara.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 116 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah, besarnya tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang dikenakan pada setiap liter bahan bakar yang dikonsumsi oleh masyarakat adalah 7,5%. Sementara itu, besarnya tarif PBBKB berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 paling tinggi sebesar 10%. PBBKB

sendiri adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan kendaraan bermotor.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut yang menunjukkan penurunan target dan realisasi pajak bahan bakar kendaraan bermotor, peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti, serta membahas masalah yang menjadi proposal dengan judul **“Analisis Kontribusi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (UPT PPD Surabaya Utara)”**.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti akan menganalisis tentang pengetahuan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, sekaligus Kontribusi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah yang telah ditetapkan untuk UPT PPD Surabaya Utara. Oleh karena itu dapat dirumuskan masalahnya yaitu **“Bagaimana tingkat Kontribusi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah di UPT PPD Surabaya Utara Periode 2014-2018?”**.

### **1.3. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui **“Tingkat Kontribusi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah di UPT PPD Surabaya Utara Periode 2014-2018”**.

### **1.4. Manfaat penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat untuk beberapa pihak yaitu:

1. UPT Dinas Pendapatan Daerah Surabaya Utara

Sebagai bahan evaluasi kinerja agar dapat meningkatkan serta memenuhi target pungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan meminimalisir piutang pajak bahan bakar kendaraan bermotor khususnya di Surabaya Utara.

2. Pembaca lainnya

Sebagai referensi dalam menulis proposal mengenai besarnya kontribusi pajak bahan bakar kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah, dan sebagai sumber pengetahuan mengenai prosedur pemungutan, penyetoran, pelaporan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

3. STIE Perbanas Surabaya

Untuk menambah literasi maupun kajian yang akan digunakan oleh mahasiswa terkait penelitian ini.

